Tanah Grant Sultan Melayu Deli menurut Teori Positivistik

Land Grant of Deli Malay Sultan According to Positivistik Theory

Rafiqi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 04 Maret 2019; Disetujui: 17 Oktober 2019; Dipublish: 6 Desember 2019

*Corresponding Email: rafiqi121@gmail.com

Abstrak

Sertifikat tanah "Grant Sultan" bukanlah dasar hak. Sertifikat tersebut hanya menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah hak Grant Sultan sebelumnya. Sertifikat Hibah Sultan adalah panduan bagi Badan Pertanahan Nasional untuk melihat dasar kepemilikan tanah. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, tanah yang disertifikasi oleh Grant Sultan akan dikonversi menjadi tanah, baik konversi langsung atau tidak langsung, pertimbangan dan penilaian lebih lanjut perlu dilakukan. Dari latar belakang Penulisan ini dirumuskan masalah Bagaimana Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah pemegang Tanah Grant Sultan pada masyarakat Adat Melayu Deli, bagaimana Tanah Grant Sultan pada masyarakat Melayu Deli dilihat dari Teori Positivistik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undnagan dan konsep. Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah pemegang Tanah Grant Sultan pada masyarakat Adat Melayu Deli jika dilihat dari aliran pemikiran positivistic, bahwa tanah Grant Sultan wajib didafrakan oleh pemegang Grant Sultan untuk menjamin kepastian hukum. Tanah Grant Sultan pada masyarakat Melayu Deli dilihat dari Teori Positivistik. Menurut Pound hukum adalah Rekayas Sosial konflik dengan kepentingan dibandingkan dengan yang lainnya. Dari teori Positivistik pemegang Grant harus segera mendaftarkan tanah Grant Sesuai Peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci: Grant Sultan, Yurisprudensi Sosiologis.

Abstract

"Grant Sultan" land certificate is not the basis of rights. The certificate only explained that the land was Grant Sultan's previous right. The Sultan Grant Certificate is a guide for the National Land Agency to see the basis for land ownership. In accordance with the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5/1960, land that is certified by Grant Sultan will be converted to land, either direct or indirect conversion, further consideration and assessment needs to be done. From the background of this writing the problem is formulated How Legal Certainty Land Registration holders of Grant Sultan Land in Deli Malay Customary Community, how Grant Sultan Land in Deli Malay society is seen from Positivist Theory The research method used in this writing is a regulatory approach and concept. Legal Certainty Land Registration of Grant Sultan Land holders in the Deli Malay Customary community if seen from the positivistic school of thought that Grant Sultan's land must be registered by Grant Sultan holders to ensure legal certainty. Grant Sultan's land in the Deli Malay community is seen from the Positivist Theory. According to the Pound the law is a Social Engineering conflict with interests compared to the others. From positivistic theory Grant holders must immediately register Grant land in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration.

Keywords: Grant Sultan, Sociological Jurisprudence.

How to Cite: Rafiqi (2019). Tanah Grant Sultan Melayu Deli Menurut Teori Positivistik, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019 : 102 - 107

PENDAHULUAN

Hak-hak atas tanah di Sumatera bagian TImur mempunyai corak dan sifat tersendiri sebagai akibat dari riak gelombang kedatangan kapital asing. Penduduk didaerah-daerah yang diperintah oleh raja, banyak terdiri dari orang-orang Timur Asing dan Eropa, yang pada satu masa tertentu dalam sejarah ditaklukkan pada pada perturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gebernemen Hindia Belanda, sedangkan Swapraja mempunyai hak pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*), mempunyai lingkungan kekuasaan personil hanya terhadap penduduk yang digolongkan kedalam "kaula raja" sehingga dengan demikian para orang Eropa dan Timur Asing, yang berdiam didaerah-daerah Swapraja seolah-olah mempunyai hak eksteritorialitas. (Mahadi, Sedikit sejarah Perkembangan hak-hak suku melayu atas tanah di Sumatera bagian TImur)

Kajian aturan-aturan tentang Konflik Pendaftaran Grant Sultan pada Masyarakat Melayu Deli disebabkan sekurang-kurangnya beberapa hal: 1) Masih berlangsung Pemegang Grant Sultan Pertama tidak mendaftarkan Grant Sultan untuk dikonversi, ketika pemegang Grant Sultan pertama meninggal, ahli waris pemegang Grant Sultan ingin menjual tanah, baru akan didaftarkan oleh ahli waris kedua atau ketiga yang tidak menguasai tanah bahkan tidak mengetahui letak tanah tersebut, sehingga Grant Sultan tersebut diklaim palsu; 2) Belum ada solusi normatif berkaitan dengan konversi tanah Grant Sultan sebagai pemegang Grant Sultan yang paling berhak, untuk menjamin kepastian hukum, sehingga terjadi sengketa berkepanjangan dan tolak ukur melihat posisi Tanah Grant Sultan pada masyarakat Melayu Deli.

Oleh karena ia tidak takluk pada hukum swapraja, maka hak tanah, yang biasanya dipunyai oleh pribumi, tidak dapat dimiliki oleh Eropa/Timur Asing.

Pada tahun 1889 Gubernemen Belanda menerapkan suatu akta. Akta ini disebut dengan istilah "Grant" satu kata Inggris, yang diambil alih dari tanah semananjung Malaya.

METODE PENELITIAN

Dari sudut sifat penelitian, digunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yan merupakan bagian dari pendaftaran tanah Grant Sultan. Pendekatan Konsep digunakan berbagai pendapat ahli hukum dan sejarah. Buku-buku yang digunakan dalam penulisan menggunakan Buku yang berkaitan tentang Agraria, Pertanahan, Teori Hukum dan Sejarah Melayu.

Teknik dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen yaitu studi mengkaji tentang Agraria, Pertanahan, teori Hukum dan Sejarah Melayu yang berkaitan dengan penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah pemegang Tanah Grant Sultan pada masyarakat Adat Melayu Deli.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dalah teori kepastian Hukum oleh Hans Kelsen dan Teori sistem oleh Lawrence Meir Friedman sebagai pisau analisis. Menurut Hans Kelsen hukum merupakan bagian dari norma. Norma sebaiknya harus dilihat dari aspek das sollen sesuai peraturan. Norma-norma adalah perilaku Deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang berisi aturan-aturan yang bersifat aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertindak laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepasitian hukum.

Salah suatu hak milik adat adalah tanah-tanah yang berstatus Grant. Grant tersebut berlaku di Sumatera bagian timur, yaitu di wilyah kesultanan Deli. Hak Grant di Sumatera bagian TImur, Hak Grant pada mas Kesultanan Deli diberikan oleh raja kepada masyarakat melayu Deli maupun bangsa asingn. Istilah “grant: berasal dari bahasa Inggris ini diperkirakan karena latar belakang hubungan kekeluargaan keluarga Sultan Melayu Deli dengn Malayasia. Grant Sultan diwilayah kerajaan asli melayu adalah dibawah kekuasaan langsung sultan. Dengan demikian, Grant Sultan yang diterbitkan untuk Kuala Swaparaja hanya ditandatangani dan diberi materai langsung oleh sultan.

Grant Sultan sebelum tahun 1890 sikeluarkan oleh Kepada Urung. Kepala urung merupakan Kepala diasumsian merupakan kepala adat yang berada daerah bagian dari wilayah sultan pada masyarakat Melayu. Adanya kepala urung adalah sebagai pemimpin bagi komunitas kuala swapraja non melayu, yang pada umumnya suku batak, khususnya yang berada dibawah kedaulatan dan kekuasaan sultan.

Pada tahun 1890, Grant Sultan baru dikeluarkan, walaupun daam kenytaannya tanah tersebut sudah ditempati oleh masyarakat. Ketika akan menualn Grant tersebut baru akan dikelurkn oleh Sultan.

Pamong Desa maupun pihak intatansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas yang berhubungan dengan permohonan sertipikat tersebut, melibatkan para pemohon Penjelasan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pihak yang terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluarsa bahkan adanya kalanya tidak benar.

Tanah swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang

husus berlaku didaerah Swapraja. Dalam daerah Swapraja tersebut hukum tanah diciptakan oleh Pemerintah Swapraja dan sebagaian oleh Belanda. Kesultanan Deli merupakan daerah yang memiliki suatu pemeintahan tersendiri tentang pertanahan dengan menggunakan Hukum Tanah swapraja. Perturan pertanahan yang terdapat kesultanan Deli menggunakan perturan pertanahan di Sumatera bagian TImur. Itulah sebabnya Kesultanan Deli merupakan salah satu wilayah daerah Swapraja.

Terdapat 3 (tiga) jens Grant yang belaku di Sumatera bagian timur, yaitu: 1) Grant Controleur (Grant C), yaitu dokonversi menjadi hak pakai yakni Sultan memberikan Grant kepda bangsa asing; 2) Grant Deli maatschappij (Grant D), yaitu Hak paki yakni Grant yang diberkn Sultan kepda Bangsa asing; 3) Grant Sultan (Grant S), yaitu Dikonversi menjadi hak Milik, Sulta memberikan kepda pribumi sebidang tanah bauk berupa hak milik, hak Gunan Bangunan da hak Guna Usaha.

Untuk golongan bumiputera tidak ada suatu hukum pendaftaran tanah yang bersifat uniform, sungguhpun ada secara sporadik kita ketemukan beberapa pendaftaran yang sederhana dan belum sempurna, seperti Grant Sultan Deli, Geran Lama, Geran Lama, Geran Kejuran, pendaftar tanah sistem pendafatran kadester.

Kerajaan asli Melayu adalah dibawah kekuasaan langsung Sultan Grant Sultan yang diterbitkan untuk Kaula Swapraja hanya ditandatangani dan diberi materai langsung oleh sultan.

Dengan demikian Grant Sultan yang diterbitkan untuk Kaula Swapraja hanya ditandatangani dan diberi materai langsung oleh sultan. Kerajaan asli Melayu tersebut meliputi “Percut Sungai Tuan, Bedagai dan Padang.

Grant tidak semua dikeluarkan oleh Sultan. Grant yang tidak dikeluarkan oleh Sultan dikeluarkan oleh Kepala Urung. Urung merupakan suatu Kumpulan

masyarakat kaula Swapraja yang bukan Suku Melayu.

Kepala urung memiliki kewenangan dan mengeluarkan surat keterangan tanah yang sesuai dan kehendaki untuk mengusahakan tanah. Grant yang dikeluarkan disebut Grant Datuk dan Grant Kampung. Grant tersebut dicantumkan kata "milik". Milik dalam hal tersebut hanya dapat dan diperuntukkan dalam hal mengusahakan tanah.

Pemerintahan Swapraja memiliki kantor untuk pendaftaran Grant, Kantor pemerintahn Swaprja diadakan untuk pemindahan hak penguasaan tanah

Di dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomo5 Tahun 1960 Sertifikat tanah Grant Sultan sebagai petunjuk bukan sebagai dasar alas hak. Badan pertanahan nasional akan mengkonversi Grant Sultan jika dibuktikan bahwa pemegang Grant tersebut asli sebagai pemiliknya.

Pemegang Grant Sultan harus dapat membuktikan dan mengetahui bukti fisik. Untuk mengkonversi dan mengubah menjadi hak milik. Badan pertanahan akan melakukan *Clear and Clean*.

Status Hukum tanah di Indonesia terdapat dualisme yakni diatur dalam Hukum Adat dan buku ke 2 Kitab undang-undang Hukum perdata.

Sejak tahun 1961 pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah tentang pendaftaran Tanah agar terjamin kepastian hukum. Yakni siapa yang berhak (subjek) dan dapat menguasai batas-batas tanah (objek).

Jika hak-hak atas tanah didaftarkan atau diberikannya makan hak-hak atas tanah kepada semua subyek hak juga diberikan wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Maka sebagai subjek hukum tersebut mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan tanah dimaksud.

Indonesia menganut stelsel negatif dalam sistem pendaftaran tanah. Didalam

hubungannya dengan konversi hak, ditempuh cara yang tepat tapi teliti, aman, murah, sederhana dan dapat dipahami masyarakat luas. segera setelah semua syarat formal dipenuhi, dapat saja suatu bidang tanah yang dihindangi hak milik menurut hukum Adat Indonesia, disertifikatkan, dengan catatan bahwa karena dianut asas negatif, maka terbuka kemungkinan untuk menggugurkan hak seorang/pihak sekiranya ada pihak/orang lain yang lebih berhak atasnya, dari itu harus dibuktikan.

Ketidaksinkronan nilai dan norma hukum yang dianut dimasing-masing diakibatkan karena ketidaksinkronan factor sosiologis. Institusi dan forum serta domainnya nilai-nilai hukum yang dianut pemerintah resmi (tercakup didalamnya badan peradilan) secara demonstratif memperkecil kekuasaan dan kewenangan kelompok masyarakat Deli atas tanah-tanah komunalnya. Teori hukum adat yang menegaskan bahwa dalam hal. hak perseorangan membesar, maka hak komunal mengecil secara evolutif atau alamiah hampir tidak bisa dipertahankan lagi. Posisi dan peran negara dominan dan super (melalui kebijakan dan strukturnya) serta menyebabkan mengecil dan punahnya kuasa hak atas tanah yang dimiliki kelompok masyarakat adat Melayu Deli.

Tanah Grant Sultan pada masyarakat Melayu Deli dilihat dari Teori Positivistik.

Bahwa setiap golongan lapisan masyarakat memiliki asumsi-asumsi dasar terhadap pengaturan, walaupun sebagian besar bersifat implisit daripada dirumuskan secara jelas. Asumsi-asumsi tertentu ini dapat diidentifikasi sebagai postulat turidis dari sistem hukum sebagai perwujudan tujuan fundamentalnya. Pound telah berusaha menyatakan tujuan dari hal ini untuk masyarakat Barat, yang mengetahui bahwa hal ini tidak statis tapi

dapat berubah sejalan dengan masyarakat yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan dan ketegangan-ketegangan baru. Beberapa postulat ini bisa jadi akan menjadi konflik, tapi keberhasilan suatu golongan masyarakat tertentu akan ditentukan oleh tingkat integrasi sosialnya dan menerima landasan umum postulat dasar. Hal ini adalah penilaian yang dapat mempengaruhi pilihan-pilihan dan perilaku kita, dan sebaiknya, sebagaimana yang dikatakan Pound, dapat berperan sebagai faktor yang menentukan dalam menetapkan keputusan yudisial. Juga, nilai-nilai yang relatif akan dipertimbangkan, setelah sikap-sikap para penganut Utilitarianisme, dengan pertimbangan konsekuensi, dan walaupun hal-hal ini tidak dapat diprediksi, kajian-kajian sosial memberikan kunci ke arah ini.

Pound tidak memberikan banyak perhatian yang rinci terhadap cara seseorang bisa berkonflik dengan kepentingan dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi Pound mengindikasikan bahwa kepentingan yang demikian dinyatakan dalam aspek sosialnya, dan begitu juga kepentingan-kepentingan lainnya, karena sebaliknya akan ada built-in-bisa yang mendukung sosial yang berteentangan dengan pandangan pribadi.

Grant Sultan Deli, Geran Lama, Geran Lama, Geran Kejuran, pendaftaran tanah, tidak ada suatu hukum pendaftaran tanah yang bersifat uniform untuk golongan bumiputera. Secara sporadik kita ketemuan beberapa pendaftaran yang sederhana dan belum sempurna, daerah yang sudah berkembang dan menirukan sistem pendaftaran kadaster.

SIMPULAN

Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah pemegang Tanah Grant Sultan pada masyarakat Adat Melayu Deli jika dilihat dari aliran pemikiran positivistik bahwa tanah Grant Sultan wajib didaftarkan oleh

pemegang Grant Sultan untuk menjamin kepastian hukum.

Tanah Grant Sultan pada masyarakat Melayu Deli dilihat dari Teori Positivistik. Menurut Pound hukum adalah Rekayas Sosial, konflik dengan kepentingan dibandingkan dengan yang lainnya. Dari teori Positivistik pemegang Grant harus segera mendaftarkan tanah Grant Sesuai Peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali A dan Heryani W, (2012), Menjelajahi kajian Empiris Terhadap hukum, Jakarta, Kharisma Putra Utama.
- Ali A, (2002), Menuak tabir hukum, (Suatu Kajian Folisofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Amiruddin dan Asikin Z, (2004), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- B. Srief Sidharta, (1999), Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung, Mandar Maju
- Harsono B, (2003), Hukum Agraria Indonesia, djmbatan, Jakarta
- Ikhsan, E. (2015). Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukum: hilangnya ruang hidup orang Melayu Deli. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Gerard Jansen, Grantrechten In Deli, (oostkust Van Sumatera Institut, 1925)
- Lubis MY, Lubis AR, (2010), Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju
- Mahadi, (1976), Sedikit Sejarah Perkembangan hak-hak suku Melayu atas tanah di Sumatera bagian TImur (tahun 1800-1975), Alumni
- Marzuki P, (2008), Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta
- Parlindungan A.P. (1994), Pendaftaran tanah Tanah di Indonesia, Mandar Maju Bandung,
- Ratna, (1992), Orang Karo di Kerajaan Deli dalam masyarakat Indonesia: Majalah ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Jilid XiX Nomor 1
- Salindeho J, (1994), Manusia, Tanah, Hak dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Siregar H, (1971), Hukum Tanah menurut Hukum Adat, Medan, Penerbit FH USU
- Soekanto S, (1986), Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta, UI Press
- Soekanto S. (1984), Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sunggono, B. (1997). Metodologi penelitian hukum: suatu pengantar. PT Raja Grafindo Persada.
- Wignjosebroto S, (2002), Hukum, paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya, Elsam-Huma, Jakarta

- Meuwissen, (1994), Pengembangan Hukum, Bandung, FH UNPAR Majalah Hukum Pro Justia Tahun XII Nomor 1 J(XII)(1) (221-222)
- Veth. P.J. Het landschap Deli Op Sumatera, TKAG: 1877
- Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960
- Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- <https://id.wiktionary.org/wiki/kedudukan>, diakses pada tanggal 21 November 2018.